

26. RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun perencanaan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor ...);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);

26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Menguraikan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Menguraikan tentang Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.
BAB V	Penutup Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Evaluasi kinerja tahun 2024 didasarkan pada rencana kerja tahun 2024 yang tertuang dalam LkjIP Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, realisasi atas anggaran tahun 2024 sebesar Rp 10.168.402.316,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 10.098.992.316,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 69.410.000,00 sehingga capaian serapan anggaran atas pencapaian strategis sebesar 97,77%.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Belanja Operasi	10.326.927.456	10.098.992.316	97,79%
Belanja Modal	73.421.200	69.410.000	94,54%
TOTAL	10.400.348.656	10.168.402.316	97,77%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	Laporan	7	7	7	100,00	7	21	75,00
6	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	101,54	101,54	100	100	100,00
6	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/ Bulan	37	34	34	100,00	34	34	91,89
6	0	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1000	Dokumen	321	250	275	110,00	250	846	84,60
6	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	72	Laporan	18	18	18	100,00	18	54	75,00
6	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	100	%	100	100	82,89	82,89	100	100	100,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025		
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
			0 5			daerah yang sesuai standar									
6	0 1	0 1	2 . 0 0 5 2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8	Paket	2	2	2	100,00	2	6	75,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 5 0	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	47	Orang	47	46	46	100,00	46	46	97,87
6	0 1	0 1	2 . 0 0 5 1	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	37	Orang	38	34	34	100,00	37	37	100,00
6	0 1	0 1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentaseketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	110,72	110,72	100	100	100,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 6 1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100,00	1	3	75,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 6 2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	4	4	100,00	3	10	83,33
6	0 1	0 1	2 . 0 0 6 3	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	4	4	4	100,00	3	11	91,67
6	0 1	0 1	2 . 0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	20	12	12	100,00	12	44	91,67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			0 6 4	0 4											
6	0 1	0 1	2 . 0 0 6 5	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	2	3	150,00	1	5	125,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 6 6	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96	Dokumen	24	12	12	100,00	12	48	50,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 6 7	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	Laporan	39	32	25	78,13	20	84	127,27
6	0 1	0 1	2 . 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 7 2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia	1	Unit	0	0	0	-	0	0	0,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 7 5	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	2	0	0	-	5	2	10,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 7 6	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84	Buah	23	13	5	38,46	1	29	34,52
6	0 1	0 1	2 . 0 0 7 7	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	4	Unit	0	0	0	-	0	0	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			0 9 6	0 0 0 9 8											
6	0 1	0 1	2 . 0 0 9	0 0 0 9 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8	Unit	0	1	1	100,00	1	2	25,00
6	0 1	0 1	2 . 0 0 9	0 0 0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	2	1	2	200,00	1	5	62,50
6	0 1	0 1	2 . 0 0 9	0 0 0 9 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	104	Unit	151	1	2	200,00	1	154	148,08
					Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	Opini							
					Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	85	%							
						Nilai Maturitas SPIP	3,335	Nilai							
6	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	92,5	%	92	89	92,07	103,45	90	92,07	99,54

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85	%	83,07	80	83,42	104,28	82,5	83,42	98,14
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100	%	100	90	100	111,11	100	100	100,00
						Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	92,5	%	92	89	92,07	103,45	90	92,07	99,54
						Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85	%	83,07	80	83,42	104,28	82,5	83,42	98,14
6	0	0	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10	PD	10	10	10	100,00	10	10	100,00
						Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90	%	92	90	92,07	102,30	90	92,07	102,30
						Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70	%	100	70	100	142,86	70	100	142,86
						Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87,5	%	88,5	87,5	83,42	95,34	87,5	83,42	95,34
6	0	0	0	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120	Laporan	33	30	50	166,67	30	113	94,17

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				01											
6	01	02	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160	Laporan	42	42	42	100,00	40	124	77,50
6	01	02	01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120	Laporan	90	30	81	270,00	30	201	167,50
6	01	02	01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200	Laporan	76	50	82	164,00	50	208	104,00
6	01	02	01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	Kesepakatan	3	3	4	133,33	3	10	83,33
6	01	02	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	Dokumen	4	4	4	100,00	4	12	75,00
6	01	02	20	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100	%	100	100	112,5	112,50	100	100	100,00
6	01	02	20	0021	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8	Laporan	2	2	2	100,00	2	6	75,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
											Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	0	0	2	0	0	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38	Laporan	8	4	5	125,00	12	25	65,79
						Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP									
						Sasaran 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	100	%							
6	0	0				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1	PD	1	1	4	400,00	1	1	100,00
							Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29	PD	30	30	30	100,00	30	30	103,45
6	0	0	2			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4	Dokumen	4	4	5	125,00	4	13	325,00
6	0	0	2	0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16	Rekomen dasi	4	4	3	75,00	4	11	68,75
6	0	0	2	0	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di	16	Rekomen dasi	4	4	4	100,00	4	12	75,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			01	02		Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun									
6	01	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	16	PD	4	4	4	100,00	4	4	25,00
						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
						Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100,00
6	01	03	20202	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	PD	30	30	30	100,00	30	30	100,00
6	01	03	20222	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	PD	10	10	14	140,00	10	10	100,00
6	01	03	20223	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64	Kegiatan	17	16	16	100,00	16	49	76,56
6	01	03	2020	000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang	24	PD	6	6	4	66,67	6	16	66,67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			02	04		Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								

- 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
- 1) Program :
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator:
 - Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1;
 - Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1;
 - Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2;
 - Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2.
 - 2) Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti.
 - b. Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan
- 1) Program :
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator :
 - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
 - Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)
 - 2) Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya
 - i. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - j. Pendampingan dan Asistensi dengan indikator :
 - Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP
 - Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan
- 1) Program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A).
 - 2) Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator :
 - Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti;

- Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu.

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

1) Tidak tercapainya :

- a. Target kinerja terlalu tinggi dibandingkan dengan kapasitas sumber daya.
- b. Kurangnya responsivitas dari pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit APIP.

2) Terpenuhi atau melebihi target :

- a. Kerja sama lintas tim yang baik, termasuk koordinasi dengan perangkat daerah.
- b. Target awal yang konservatif atau terlalu rendah, sehingga realisasi kinerja menjadi lebih mudah melampaui target.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, capaian kinerja pada tingkat program menunjukkan hasil yang positif, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan yang cukup baik, dukungan koordinasi lintas perangkat daerah yang optimal, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif. Meskipun demikian, pada tingkat kegiatan masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target, seperti Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti dan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antar-kegiatan yang perlu diantisipasi melalui evaluasi indikator dan penguatan sumber daya pada kegiatan yang belum memenuhi target.

Implikasi dari capaian ini adalah perlunya penajaman target kinerja di perencanaan kedepan agar lebih mencerminkan kondisi riil, serta penyesuaian baseline untuk kegiatan yang secara konsisten melampaui target. Sementara itu, kegiatan yang belum memenuhi target perlu mendapatkan perhatian khusus melalui perbaikan mekanisme kerja, peningkatan koordinasi, serta penguatan manajemen sumber daya manusia dan sarana pendukung. Hasil evaluasi ini juga menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana kerja berikutnya serta dalam penyempurnaan perjanjian kinerja perangkat daerah agar lebih seimbang dan terukur.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

- 1) Evaluasi dan penajaman target kinerja
- 2) Penyusunan rencana kerja berbasis kinerja (performance-based planning), seperti mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja ke dalam dokumen perencanaan.
- 3) Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah
- 4) Pengembangan kapasitas SDM

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pada tabel di bawah ini disajikan target capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level impact yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun target IKU dan IKK Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	IKU	81%	82%	83%	84%	81%	85,05%	85%	85,06%	85,07%	85,08%	Realisasi tahun 2024 di atas target dengan tingkat capaian 102,41%
2	Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tingkat capaian tahun 2024 100%
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A(84,96)	A(84,97)	A(86,69)	A(86,69)	A(84,96)	A(85,60)	A(86,69)	A(86,69)	A(86,80)	-	Tingkat capaian tahun 2024 100%
4	Maturitas SPIP	IKK	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Maturitas SPIP tahun 2024 berada pada level 3 sama dengan target yang telah ditetapkan
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	IKK	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Kapabilitas APIP tahun 2024 berada pada level 3 sama dengan target yang telah ditetapkan

- 2.2.1 Indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
Tidak ada indikator yang tidak memenuhi target kinerja.
- 2.2.2 Indikator kinerja yang memenuhi target kinerja yang direncanakan
 - 1) Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)
 - 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - 3) Maturitas SPIP
 - 4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)
- 2.2.3 Indikator kinerja yang melebihi target kinerja yang direncanakan
 - 1) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti
- 2.2.4 Faktor pendukung tercapainya target kinerja
 - 1) Komitmen pimpinan daerah
 - 2) Pendampingan teknis berkelanjutan kepada perangkat daerah
 - 3) Pemanfaatan mekanisme monitoring berkala
- 2.2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Seluruh indikator kunci, mulai dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, peningkatan kualitas manajemen kinerja melalui SAKIP, penguatan maturitas SPIP, hingga peningkatan kapabilitas APIP telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan pondasi kinerja yang sudah tercapai, kini berada pada tahap transisi dari kepatuhan administratif menuju penguatan kualitas dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berbasis kinerja dan risiko.

- 2.2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
 - 1) Evaluasi dan penajaman target kinerja
 - 2) Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah
 - 3) Pengembangan kapasitas SDM

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
- 2. Belum adanya integrasi antar aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan dari level OPD sampai level kota.
- 3. Belum optimalnya penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan perencanaan dan penganggaran.
- 4. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut.
- 5. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

6. Tata cara pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit masih menggunakan sistem desk tiap tribulan, sehingga tidak efektif dan menyebabkan penumpukan rekomendasi. Beberapa isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Memaksimalkan Aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaikan rekomendasi APIP dan BPK
		Perubahan Sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline
		Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan
		Pembuatan Prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluwarsa
		Pendampingan OPD yang dievaluasi Zona Integritas
		Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Zona Integritas dan SPIP secara berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas sumber daya APIP melalui Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 Jam
	Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang terintegrasi	-

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menuju pada terwujudnya Kota Blitar Cerdas, Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendeknya yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2025 - 2029. Tema pembangunan tahun 2026 adalah Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan merupakan program yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program perangkat daerah yang dipilih karena memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Dalam implementasinya, program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program Prioritas Pembangunan Daerah ini juga dapat dimaknai sebagai program pembangunan daerah yang nantinya sekaligus akan menjadi program perangkat daerah. Prioritas pembangunan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif
- 2) Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
- 3) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Daerah yaitu membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektorat Daerah mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Janji Politik Wali Kota yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program pembangunan daerah yang menjawab Janji Politik Walikota Blitar dan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Penyelarasan Program Prioritas Walikota dan Inspektorat Daerah
Kota Blitar
Tahun 2026

No	Janji Politik/ Kampanye	Program
1	Pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Bekerjasama dengan Lembaga Profesional dalam melaksanakan penilaian dan pengawasan kinerja pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Kerjasama Pengawasan Internal Pendampingan proyek strategis oleh APH, Peningkatan kapasitas APIP bekerjasama dengan BPKP, Kemenpan RB)
3	Memanfaatkan Teknologi dalam tata kelola pemerintahan guna transparansi dan akuntabilitas	1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, Pendampingan, asistensi, verifikasi penegakan reformasi birokrasi; monev dan penanganan pengaduan masyarakat) 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan)
4	Pelayanan Publik Bebas Pungli	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (ZI, Saber Pungli, Penegakan Integritas, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

Nama PD : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	88,05	7.705.018.191,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	7.713.233.971,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.030.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	38.614.800,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.698.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.698.400,00	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	28.332.500,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	28.220.600,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
c						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	898.600,00	Penambahan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
d						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	898.600,00	Penambahan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
e	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	3.000.000,00	
f						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	898.600,00	Penambahan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	6.259.021.991,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	6.259.029.671,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ bulan	6.254.818.191,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ bulan	6.254.868.271,00	
b	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	1.650.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	1.650.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	2.553.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	2.511.400,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	1.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	898.600,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.500.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	898.600,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	469.597.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	478.510.000,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.045.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	12.673.500,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	160.997.500,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	160.964.500,00	
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	293.554.600,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	304.872.000,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	257.037.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	257.064.100,00	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.763.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.754.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.591.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.590.000,00	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.413.900,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.412.900,00	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.440.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.438.000,00	
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14.874.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14.873.900,00	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.700.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.754.000,00	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	162.754.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	162.750.700,00	
h	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1.500.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1.490.600,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	27.409.300,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	15.504.000,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
a	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.409.300,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.304.000,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.200.000,00	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Penghapusan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	425.391.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	445.131.900,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	103.689.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	103.688.700,00	
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	321.702.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	341.443.200,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	229.030.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	218.480.900,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
a						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24.233.400,00	Penambahan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	84.749.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	63.697.800,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
c	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.681.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.480.400,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	35.100.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	35.089.300,00	
e	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	76.500.000,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.480.000,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	48%	1.403.916.930,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	93,8%	1.403.915.550,00	Penyesuaian target berdasarkan analisis kebutuhan
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	83,44%	1.356.968.030,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	83,44%	1.356.967.150,00	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	349.902.650,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30 Laporan	349.902.650,00	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	33.063.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	33.063.000,00	
c	Reviu Laporan Kinerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	113.198.000,00	Reviu Laporan Kinerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	113.197.700,00	
d	Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	52.783.000,00	Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan	52.782.900,00	
e	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	801.981.580,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	801.981.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	6.039.800,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	6.039.500,00	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	46.948.900,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	46.948.400,00	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	4.426.200,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	4.426.000,00	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	42.522.700,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	42.522.400,00	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	362.449.100,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	354.234.700,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,966 Indeks			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,966 Indeks		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku	4 Rumusan	20.474.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku	4 Rumusan	5.596.800,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	20.474.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	5.596.800,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
2	Pendampingan dan Asistensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK	4 PD	341.974.800,00	Pendampingan dan Asistensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK	4 PD	348.637.900,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan
		Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	20%			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	20%		
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	4.830.700,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	4.830.400,00	
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	153.124.500,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	159.786.200,00	Penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	51.847.000,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	66.823.400,00	Penambaha pagu berdasarkan analisis kebutuhan	
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah	132.172.600,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 perangkat daerah	117.197.900,00	Pengurangan pagu berdasarkan analisis kebutuhan	
Jumlah					9.471.384.221,00	Jumlah					9.471.384.221,00	

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat beberapa perubahan baik penambahan maupun pengurangan sub kegiatan dan pagu anggaran namun tidak memengaruhi jumlah total anggaran. Semua perubahan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Blitar tidak didapati program/kegiatan yang mengarah kepada program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar. Adapun hasil telaahan atas usulan program dan kegiatan masyarakat pada program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2026 adalah nihil.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Kota Blitar

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Terdapat 8 Prioritas Nasional, sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan merata.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (human capabilities) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi. Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan

industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menguatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Daerah yaitu membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektorat Daerah mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang ingin dilaksanakan, dengan demikian tujuan tidak boleh lepas dari upaya pencapaian keberhasilan misi. Dengan merumuskan tujuan dimaksudkan agar upaya pencapaian misi lebih terarah dan terfokus. Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Blitar di tahun 2026 - 2027 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 – 2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
					2023	2024	2026	2027
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah pada Tahun N	Terdefinisi (3,199)	Terdefinisi (3,026)	Terdefinisi (3,034)	Terdefinisi (3,038)
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan adalah penjelasan tentang bagaimana opini audit (seperti Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat) diukur dan diidentifikasi dalam suatu penelitian	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
					2023	2024	2026	2027
				atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang				

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
					2023	2024	2026	2027
				berlaku umum di Indonesia. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.				
2	Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	Σ Tindak lanjut atas hasil rekomendasi internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti : Σ rekomendasi internal dan eksternal x 100 %	85,05%	85%	85,07%	85,08%
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi masyarakat tentang tingkat korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)pada Tahun N	9,08	9,51	9,53	9,54

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
					2023	2024	2026	2027
			di lingkungan pemerintah atau lembaga publik, serta upaya pencegahannya.					
3	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	84,38	87,34	89,3	89,35

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
eningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah sesuai dengan standard pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
	Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	Penguatan maturitas SPIP melalui peningkatan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko	Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas dan komprehensif terkait pelaksanaan SPIP
			Mendorong penerapan SPIP secara menyeluruh pada perangkat daerah
			Integrasi SPIP dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja
			Monitoring dan evaluasi SPIP berbasis indikator maturitas
		Peningkatan kepatuhan dan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	Menetapkan Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
			Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian tindak lanjut
			Optimalisasi Aplikasi Si Patriawas
			Pemberian reward dan punishment terhadap perangkat daerah atas kinerja tindak lanjut

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan sistem pencegahan melalui implementasi sistem whistleblowing yang efektif dan melindungi pelapor	Penguatan koordinasi dengan BPK/BPKP terkait keakuratan dokumen tindak lanjut
			Menetapkan kebijakan anti korupsi
			Optimalisasi kanal pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR, JAGA.ID, whistleblowing system, Klinik Pengawasaan)
			Publikasi capaian program anti korupsi dan inovasi pencegahan korupsi secara berkala
			Publikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
		Peningkatan pemahaman, kapasitas, dan penerapan manajemen risiko di perangkat daerah	Menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko
			Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan kinerja dan SPIP
			Bimbingan teknis dan asistensi penerapan manajemen risiko berbasis indikator risiko utama
			Pengembangan sistem informasi manajemen risiko daerah
			Monitoring dan Evaluasi implementasi Manajemen Risiko
		Penguatan kapasitas dan pemerataan kompetensi APIP sesuai kebutuhan pengawasan	Penyusunan peta kompetensi dan analisis kesenjangan kompetensi APIP
			Pelatihan, sertifikasi, dan rotasi APIP berbasis kebutuhan
			Penyusunan kebijakan pengawasan
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2026-2027

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun		Keterangan
						2026	2027	
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada tingkat kematangan atau kesiapan suatu entitas pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan SPIP	Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah	Level	Terdefinisi (3.026)	Terdefinisi (3.034)	Terdefinisi (3.038)	-
2	Indeks Manajemen Risiko (IMR)	Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah suatu indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi telah mengelola risiko yang mungkin timbul.	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI.	Indeks	2.966	2.966	2.967	-

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun		Keterangan
						2026	2027	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran sebelumnya (N-1), yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tindak lanjut ini tidak hanya sebatas penyelesaian administratif, tetapi juga mencakup perbaikan substansi yang berdampak pada kinerja dan pencegahan kesalahan serupa di masa depan	[Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 / Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1] x 100%	%	93.75	93.8	93.85	-

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun		Keterangan
						2026	2027	
4	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, yang mencakup kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP. Secara operasional, kapabilitas APIP dapat diartikan sebagai tingkat kematangan APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang diukur berdasarkan beberapa indikator seperti: kualitas sumber daya manusia, dukungan sistem dan prosedur pengawasan, serta hasil pengawasan yang dicapai.	Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah	Level	Terintegrasi (3.195)	Terintegrasi (3.205)	Terintegrasi (3.21)	-

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun		Keterangan
						2026	2027	
5	Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan adalah penjelasan tentang bagaimana opini audit (seperti Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat) diukur dan diidentifikasi dalam suatu penelitian	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.	Kategori /Opini	WTP	WTP	WTP	-

3.3 Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mendukung Prioritas Nasional, Prioritas Daerah, isu-isu strategis dan tindak lanjut LKJIP pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 terdapat 3 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp9.471.384.221,00. Program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
					Inspektorat Daerah		
6	01	01			PROGRAM URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung tugas fungsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
6	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah sesuai standar	
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung tugas fungsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mendukung tugas fungsi
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung tugas fungsi
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	
6	01	02	01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Mendukung tugas fungsi
6	01	02	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Mendukung tugas fungsi
6	01	02	01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Mendukung tugas fungsi
6	01	02	01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Mendukung tugas fungsi
6	01	02	01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Mendukung tugas fungsi
6	01	02	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Mendukung tugas fungsi
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Mendukung tugas fungsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Mendukung tugas fungsi
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
						Manajemen Risiko Indeks (MRI)	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Mendukung tugas fungsi
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK	
						Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Mendukung tugas fungsi
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Mendukung tugas fungsi
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Mendukung tugas fungsi
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Mendukung tugas fungsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Blitar mendukung Prioritas Pembangunan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas	▪ Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 pada unit kerja yang diusulkan ▪ Mengawasi progres dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ▪ Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi/ Kegiatan Pendampingan dan Asistensi/ Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2	Telah dibentuk agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas	▪ Melakukan pendampingan pembentukan agen perubahan di masing-masing OPD	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi/ Kegiatan Pendampingan dan Asistensi/ Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
3	Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.	▪ Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi ▪ Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP ▪ Melakukan koordinasi dengan BPKP terkait aplikasi E Integrity	Program Penyelenggaraan Pengawasan/ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
4	Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.	▪ Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
5	Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas	Merancang pembuatan inovasi layanan pengawasan Inspektorat melalui Sistem Informasi Pengawasan dan Consulting Clinic (sipecutklik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
6	Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK	- Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SI-PATRIAWAS - Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan	Program Penyelenggaraan Pengawasan/ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
7	Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline	Mengembangkan layanan klinik konsultasi pengawasan secara offline dan online	Program Penyelenggaraan Pengawasan/ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
8	Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.	Mengembangkan layanan klinik konsultasi pengawasan secara offline dan online	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9	Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluarsa	Membuat prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluarsa	Program Penyelenggaraan Pengawasan/ Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal/ Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	898.600,00				0,00
6	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	898.600,00				0,00
6	01	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	3.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		13 Dokumen	3.000.000,00
6	01	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan								
						Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	898.600,00				0,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	6.259.029.671,00			100%	6.259.021.991,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492 Orang/bulan	6.254.868.271,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		492 Orang/bulan	6.254.818.191,00
6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Dokumen	1.650.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		250 Dokumen	1.650.000,00
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	2.511.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		18 Laporan	2.553.800,00
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	898.600,00			100%	1.500.000,00
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	898.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Laporan	1.500.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	478.510.000,00			100%	469.597.100,00
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	12.673.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Paket	15.045.000,00
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Orang	160.964.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		41 Orang	160.997.500,00
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Orang	304.872.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		41 Orang	293.554.600,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	257.064.100,00			100%	257.037.000,00
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.754.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	4.763.200,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	26.590.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Paket	26.591.400,00
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	23.412.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Paket	23.413.900,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20.438.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Paket	20.440.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	14.873.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Paket	14.874.000,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.754.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Dokumen	2.700.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Laporan	162.750.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Laporan	162.754.500,00
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.490.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	1.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	15.504.000,00			100%	14.529.300,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	5.304.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	7.409.300,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	10.200.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit	7.120.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	445.131.900,00			100%	425.391.600,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	103.688.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		24 Laporan	103.689.600,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	341.443.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		13 Laporan	321.702.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	100%	218.480.900,00			100%	258.975.370,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemerintahan Daerah		Semua Kel/Desa						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	24.233.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)			25.445.070,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	63.697.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		19 Unit	84.749.300,00
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	3.480.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Unit	3.681.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Unit	35.089.300,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		58 Unit	35.100.000,00
6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	76.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	100.000.000,00
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	15.480.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	10.000.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93,8%	1.403.915.550,00			93,85%	1.496.776.532,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	83,44%	1.356.967.150,00			83,46%	1.446.723.532,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	349.902.650,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Laporan	373.045.800,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	33.063.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		40 Laporan	35.250.000,00
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	113.197.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Laporan	120.685.000,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	52.782.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		50 Laporan	56.274.000,00
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal								
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kesepakatan	801.981.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Kesepakatan	855.029.732,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6.039.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	6.439.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	46.948.400,00			100%	50.053.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.426.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	4.718.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	42.522.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Laporan	45.335.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	354.234.700,00			Level 3	386.420.000,00
						Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,966 Indeks				2,968	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis terkait pengawasan yang tersusun sesuai peraturan berlaku	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Rumusan	5.596.800,00			4 Rumusan	21.828.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Rekomendasi	5.596.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Rekomendasi	21.828.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK		4 Perangkat Daerah	348.637.900,00			4 Perangkat Daerah	364.592.000,00
						Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengendalian risiko		20%				20%	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 perangkat daerah	4.830.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30 perangkat daerah	5.150.000,00
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 perangkat daerah	159.786.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 perangkat daerah	163.252.000,00
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Kegiatan	66.823.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		16 Kegiatan	55.276.000,00
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 perangkat daerah	117.197.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		6 perangkat daerah	140.914.000,00
J U M L A H									9.471.384.221,00				9.605.337.793,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2026.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Inspektorat Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2026 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
2. Pembentukan agen perubahan tingkat kota dari masing-masing OPD sebagai pioneer pembangunan zona integritas;
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara berkelanjutan.
4. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
5. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
6. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk penyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.

7. Perubahan sistem penyelesaian tindak lanjut secara online dan offline.
8. Mengembangkan klinik konsultasi pengawasan.
9. Pembuatan prosedur penghapusan rekomendasi yang kadaluarsa.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.